

EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

Sofyan Tri Utomo

NPP. 32.0475

Asdaf Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: sofyantriotomo17@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Sulthon Rohmadin, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Cilacap Regency is one of the regions in Central Java with a high level of vulnerability to fire disasters. Fire incidents occur quite frequently and show an increasing trend every year. **Purpose:** This study aims to analyze the effectiveness of fire disaster management in Cilacap Regency, Central Java Province. **Method:** The research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Informants consisted of structural officials, fire department personnel, and community members. The theory used in analyzing this study is Duncan's organizational effectiveness theory as cited by Steers (1985), which focuses on three dimensions: goal achievement, integration, and adaptation. **Result:** The results indicate that fire disaster management in Cilacap Regency is relatively effective, as reflected by the achievement of several key performance indicators. However, two indicators did not meet the targeted standards: the fire response time and the percentage of rescue services for victims. The main inhibiting factors are the lack of human resources, inadequate facilities and infrastructure, and an insufficient number of fire sector posts compared to the ideal standards. Efforts carried out include adding fire engines, enhancing personnel training, increasing public awareness campaigns, and proposing the establishment of additional fire posts in several districts. **Conclusion:** This research recommends optimizing personnel numbers and infrastructure capacity to improve future fire disaster management effectiveness. **Keywords:** Effectiveness, Disaster Management, Wildfire

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Cilacap memiliki tingkat kerawanan kebakaran yang cukup tinggi, dengan intensitas kejadian kebakaran yang meningkat setiap tahunnya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pejabat struktural, anggota pemadam kebakaran, dan masyarakat yang terdampak. Analisis data menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Duncan dalam Steers (1985), yang meliputi dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan kebakaran di Kabupaten Cilacap masih berada dalam kategori belum efektif. Hal ini terlihat dari capaian beberapa indikator kinerja utama Satpol PP yang belum tercapai secara mutlak, meskipun terdapat dua hal yang dapat

menjadi potensi sebagai penunjang efektivitas penanggulangan bencana kebakaran yaitu dengan dikembangkannya Aplikasi Satkartaru SIAP dan Kabupaten Cilacap juga memiliki relawan pemadam kebakaran yang cukup banyak dan militan. Kendala utama yang dihadapi adalah jumlah personel pemadam yang belum memenuhi standar nasional, keterbatasan sarana prasarana, serta jumlah pos sektor yang tidak sebanding dengan cakupan wilayah. Upaya yang telah dilakukan antara lain penambahan armada pemadam, pelatihan personel, serta peningkatan edukasi masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan pencegahan kebakaran. **Kesimpulan:** Penelitian ini merekomendasikan peningkatan jumlah pos sektor, penambahan personel, dan pemenuhan fasilitas pendukung guna meningkatkan efektivitas layanan pemadam kebakaran di Kabupaten Cilacap.

Kata kunci: Efektivitas, Penanggulangan Bencana, Kebakaran

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, non-alam, maupun faktor manusia, yang mengakibatkan korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, serta dampak psikologis. Salah satu jenis bencana yang sering terjadi dan berdampak luas adalah kebakaran.

Menurut *National Fire Protection Association* (NFPA, 2008), kebakaran merupakan proses oksidasi yang melibatkan bahan bakar, oksigen, dan sumber panas. Ketiga unsur ini membentuk reaksi kimia berantai yang menghasilkan panas dan nyala api. Sementara itu, Adzim & Ilma (2013) mendefinisikan kebakaran sebagai bencana akibat pembakaran yang tidak sesuai prosedur, baik disengaja maupun tidak, yang berpotensi membahayakan manusia dan lingkungan. Dengan demikian, kebakaran merupakan bencana kompleks yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan.

Data Kepolisian Republik Indonesia mencatat bahwa dari bulan September 2018 hingga Juli 2023 telah terjadi 5.336 kasus kebakaran, dengan 1.323 kasus terjadi hanya dalam rentang Januari hingga Juli 2023. Jawa Tengah menempati urutan keempat provinsi dengan jumlah kejadian kebakaran tertinggi pada tahun 2024. Kabupaten Cilacap sebagai salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk dan lahan kering, mencatat 152 kejadian kebakaran pada tahun 2023, dengan penyebab dominan berupa korsleting listrik. Lebih dari separuh kejadian terjadi di permukiman warga.

Bencana kebakaran di Kabupaten Cilacap tidak hanya menimbulkan kerugian material sebesar Rp12,3 miliar, tetapi juga menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Hal ini menegaskan pentingnya efektivitas penanggulangan bencana kebakaran, khususnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sayangnya, capaian kinerja pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dua indikator utama, yaitu *response time* dan pelayanan penyelamatan korban, belum mencapai target yang ditetapkan.

Faktor utama yang memengaruhi belum tercapainya efektivitas penanggulangan adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Kabupaten Cilacap hanya memiliki empat pos sektor pemadam kebakaran dari total 24 kecamatan. Jumlah personel juga masih belum ideal. Berdasarkan Permendagri No. 16 Tahun 2009, diperlukan 144 petugas untuk delapan unit kendaraan pemadam yang beroperasi 24 jam, namun yang tersedia hanya 53 orang.

Keterbatasan ini berdampak pada lambatnya penanganan dan rendahnya capaian evakuasi korban.

Penelitian ini akan menggunakan teori efektivitas dari Duncan dalam Steers (1985), yang mencakup dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, untuk menganalisis efektivitas penanggulangan kebakaran di Kabupaten Cilacap. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai hambatan serta solusi strategis yang dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan kebakaran yang responsif dan efektif bagi masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan efektivitas penanggulangan bencana kebakaran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cilacap, khususnya melalui Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Permasalahan yang diangkat berfokus pada efektivitas pelaksanaan tugas pelayanan dasar kebakaran dalam merespons kejadian secara cepat, menyelamatkan korban, serta menekan kerugian harta benda dan jiwa. Meskipun indikator kinerja utama telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan pelaporan pemerintah daerah, terdapat sejumlah capaian yang belum terpenuhi secara optimal, seperti tingkat respons petugas dan pelayanan penyelamatan korban kebakaran.

Penelitian terdahulu yang mengkaji efektivitas penanggulangan kebakaran memang telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada daerah perkotaan dengan karakteristik infrastruktur dan kelembagaan yang lebih mapan. Misalnya, penelitian oleh Muthmainnah (2022) di Kota Langsa dan Abdillah (2022) di Jakarta Timur menyoroti bagaimana BPBD atau Dinas Pemadam Kebakaran menangani peristiwa kebakaran dalam konteks kota besar. Penelitian oleh Manurung (2022) juga lebih menyoroti efektivitas pemadaman di Kota Banjarmasin, yang ditangani oleh dinas tersendiri dengan kewenangan penuh atas pengelolaan kebakaran.

Berbeda dari konteks tersebut, Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang luas dengan jumlah kecamatan yang banyak dan tingkat risiko kebakaran yang cukup tinggi, namun belum memiliki Dinas Pemadam Kebakaran secara khusus. Tanggung jawab pelayanan dasar di bidang kebakaran dilaksanakan oleh Satpol PP, yang juga mengemban fungsi lain seperti penegakan perda dan ketertiban umum. Kesenjangan muncul karena keterbatasan jumlah pos pemadam yang hanya berjumlah empat untuk melayani 24 kecamatan, keterbatasan personel yang belum memenuhi standar operasional nasional, serta sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Ketertiban dan ketenteraman umum adalah bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin keamanan warganya, termasuk dari bahaya kebakaran (Ermaya, 2007). Kondisi ini berdampak langsung pada capaian indikator teknis seperti *response time* dan keberhasilan penyelamatan korban.

Data yang tercatat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Kabupaten Cilacap Tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat *response time* hanya mencapai 91,91% dari target 93%, sedangkan capaian pelayanan penyelamatan korban hanya 80,26% dari target 100%. Hasil ini menegaskan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar dalam bidang kebakaran belum sepenuhnya berjalan efektif dan masih menyisakan ruang untuk perbaikan. Padahal, berdasarkan regulasi seperti Permendagri Nomor 114 Tahun 2018, pemadaman kebakaran merupakan sub urusan wajib pelayanan dasar yang memerlukan pemenuhan standar minimal dalam hal waktu tanggap dan kesiapsiagaan sumber daya.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis efektivitas penanggulangan bencana kebakaran yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Cilacap menggunakan teori efektivitas organisasi dari Duncan dalam Steers (1985). Pendekatan ini menilai efektivitas dari tiga dimensi utama yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan

gambaran komprehensif mengenai kendala yang dihadapi di lapangan, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis untuk peningkatan layanan kebakaran berbasis kebutuhan wilayah dan kapasitas kelembagaan daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai efektivitas penanggulangan bencana kebakaran telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya dengan fokus dan wilayah yang berbeda. Penelitian oleh Muthmainnah (2022) berjudul “Efektivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran Permukiman di Kota Langsa Provinsi Aceh” menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pencapaian tujuan dalam penanggulangan kebakaran tergolong baik, namun integrasi dan adaptasi masih cukup. Fokus utama berada pada peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang secara struktur kelembagaan berbeda dengan Satpol PP sebagai pelaksana urusan kebakaran di Kabupaten Cilacap.

Penelitian oleh Abdillah (2022) berjudul “Efektivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Timur” mengungkapkan bahwa efektivitas penanggulangan kebakaran telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat hambatan berupa sulitnya akses lokasi kebakaran dan keterbatasan anggaran pascapandemi COVID-19. Berbeda dengan Kabupaten Cilacap yang memiliki cakupan wilayah luas dan keterbatasan infrastruktur, Jakarta Timur memiliki dukungan kelembagaan yang lebih mapan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik konteks wilayah yang signifikan antara kedua penelitian tersebut.

Manurung (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran Permukiman di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan” menemukan bahwa pelaksanaan pemadaman kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran tergolong cukup efektif, terutama dalam pencapaian tujuan. Namun, penelitian tersebut juga mencatat bahwa sarana dan prasarana masih menjadi hambatan dalam aspek adaptasi. Di sisi lain, penelitian oleh Cahyani dkk. (2022) yang berjudul “Efektivitas Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Bangunan Rumah dan Lahan pada Masyarakat di Permukiman Padat Penduduk” lebih menekankan pada aspek sosialisasi, dan menyimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi pencegahan belum berjalan efektif akibat minimnya anggaran dan sarana.

Penelitian oleh Yulizar (2023) dengan judul “Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kota Padang” menyatakan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah dan strategi kebijakan belum berjalan optimal. Kelima penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan kebakaran banyak dikaji dari aspek kelembagaan formal maupun partisipasi masyarakat. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus menyoroti efektivitas pelaksanaan layanan pemadam kebakaran oleh Satpol PP di daerah yang belum memiliki dinas pemadam kebakaran tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pelayanan dasar di bidang kebakaran, khususnya di Kabupaten Cilacap.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa. Sebagian besar penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Muthmainnah (2022), Abdillah (2022), dan Manurung (2022), berfokus pada lembaga formal seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Dinas Pemadam Kebakaran di kota besar yang telah memiliki struktur kelembagaan khusus dan dukungan sumber daya memadai dalam penanggulangan kebakaran.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara spesifik mengkaji efektivitas penanggulangan bencana kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Kabupaten Cilacap, yang secara struktural tidak hanya menjalankan fungsi penanggulangan kebakaran, tetapi juga tugas-tugas penegakan perda, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di daerah yang belum memiliki dinas khusus pemadam kebakaran, dengan keterbatasan jumlah pos sektor, sarana prasarana, dan personel. Hal ini memberikan ruang kontribusi baru terhadap pemahaman mengenai efektivitas pelayanan dasar di daerah dengan keterbatasan kelembagaan dan infrastruktur.

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengintegrasikan teori efektivitas organisasi dari Duncan dalam Steers (1985) yang menitikberatkan pada tiga dimensi utama, yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pendekatan ini belum banyak digunakan secara komprehensif dalam konteks studi penanggulangan kebakaran oleh Satpol PP di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam menilai efektivitas lembaga non-dinas yang diberi mandat pelayanan dasar suburusan kebakaran.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi ilmiah yang bersifat orisinal dan kontekstual, karena membahas praktik penanggulangan kebakaran oleh Satpol PP di daerah yang tidak memiliki perangkat daerah khusus, serta menyoroti hambatan struktural, operasional, dan kelembagaan yang belum banyak diteliti sebelumnya. Hal ini memperkuat posisi penelitian ini sebagai studi yang memuat kebaruan ilmiah dan relevansi tinggi dalam konteks pelayanan publik dan manajemen kebencanaan di tingkat lokal.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penanggulangan bencana kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dengan menitikberatkan pada identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan fungsi suburusan kebakaran. Sebagaimana dijelaskan Hamdi (2014), kebijakan publik yang efektif menuntut partisipasi aktif dan proses analisis yang mempertimbangkan kondisi objektif lapangan. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas organisasi dari Duncan dalam Steers (1985), yang mencakup dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengevaluasi kinerja pelayanan dasar kebakaran di daerah yang belum memiliki dinas pemadam kebakaran tersendiri, serta menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk penguatan kapasitas kelembagaan Satpol PP dalam upaya perlindungan masyarakat dan penanggulangan risiko kebakaran secara optimal. Rofiyanti *et al.* (2024) menekankan bahwa kapasitas strategi kelembagaan lokal sangat berperan dalam menurunkan risiko kebakaran di wilayah perkotaan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode induktif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan fenomena secara mendalam dalam konteks nyata dan kompleks, khususnya dalam menilai efektivitas kelembagaan Satpol PP Kabupaten Cilacap dalam menangani bencana kebakaran. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika internal organisasi serta persepsi dari pelaksana lapangan dan masyarakat terdampak secara komprehensif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025, dengan lokasi utama meliputi Kantor Satpol PP, pos sektor pemadam kebakaran, serta wilayah terdampak kebakaran.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan kunci, yaitu Kepala Satpol PP, Sekretaris Satpol PP, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Seksi Pencegahan Sarana dan Prasarana, komandan pos sektor, anggota pemadam, serta masyarakat terdampak kebakaran. Informan dipilih secara *purposive* karena dianggap memiliki

keterlibatan langsung dan pengalaman substantif dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), laporan kebakaran, peraturan perundang-undangan, dan publikasi dari instansi terkait.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sugiyono (2019) menekankan bahwa analisis kualitatif harus dilakukan secara sistematis agar data lapangan dapat diinterpretasikan dengan tepat dan obyektif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian sosial menekankan pentingnya triangulasi untuk menjamin validitas dan kedalaman analisis (Nurdin & Hartati, 2018). Untuk mengukur efektivitas penanggulangan kebakaran, digunakan teori efektivitas organisasi dari Duncan dalam Steers (1985), yang mencakup tiga dimensi: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Ketiga dimensi ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja Satpol PP dalam pelaksanaan layanan pemadam kebakaran, baik dari sisi perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan, serta sejauh mana institusi ini mampu menjawab tantangan struktural, operasional, dan lingkungan dalam konteks pelayanan dasar di daerah. Simangunsong (2019) menyatakan bahwa metodologi penelitian pemerintahan harus mampu menggali dinamika hubungan antara struktur organisasi dan kualitas pelayanan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada subbab ini, penulis mengkaji efektivitas penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dengan menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1995), yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Ketiga dimensi ini dijadikan sebagai landasan analisis untuk menilai sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan fungsi penanggulangan kebakaran dapat dikatakan efektif. Masing-masing dimensi tersebut kemudian dikaitkan dengan indikator kinerja dan kondisi empirik yang ditemukan di lapangan, guna memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai keberhasilan, tantangan, serta kemampuan kelembagaan dalam merespons dinamika kebakaran di daerah. Penjelasan rinci mengenai ketiga dimensi tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam subbab ini.

3.1. Efektivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Cilacap

a. Pencapaian Tujuan

Dimensi pencapaian tujuan merupakan salah satu indikator dalam teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1995). Dimensi ini menilai seberapa jauh sebuah organisasi mampu mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan secara terukur. Dalam konteks ini, penanggulangan bencana kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cilacap dianalisis berdasarkan dua indikator utama: pertama, sasaran yang konkret; dan kedua, ketepatan waktu dalam memberikan layanan respon terhadap kebakaran.

Indikator pertama adalah sasaran sebagai target yang konkret, yang mengacu pada ukuran-ukuran yang telah ditetapkan dalam kebijakan nasional, yaitu Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal suburusan kebakaran daerah kabupaten/kota. Sasaran ini meliputi standar *response time* maksimal 15 menit, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan korban, serta pelaksanaan inspeksi dan investigasi kebakaran. Berdasarkan wawancara dengan pihak Satpol PP Kabupaten Cilacap, sasaran tersebut telah dijadikan rujukan utama dalam pelaksanaan tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Meskipun target tersebut telah dirumuskan secara jelas, pencapaiannya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya

jumlah pos sektor pemadam kebakaran yang hanya berjumlah empat untuk melayani 24 kecamatan. Hal ini berdampak pada cakupan wilayah yang terlalu luas untuk dijangkau oleh satu pos, sehingga memengaruhi capaian terhadap sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, khususnya dalam hal kecepatan dan pemerataan layanan.

Indikator kedua adalah ketepatan waktu, yang menjadi faktor kritis dalam keberhasilan penanganan kebakaran. Semakin cepat petugas tiba di lokasi kejadian, semakin besar peluang untuk meminimalisir kerugian material maupun korban jiwa. Penelitian Challands (2010) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara waktu tanggap layanan damkar dengan besarnya kerugian akibat kebakaran. Berdasarkan wawancara dengan pejabat dan petugas lapangan, wilayah kota umumnya dapat dijangkau dalam waktu 7–10 menit, sedangkan wilayah kecamatan yang jauh seperti Gandrungmangu atau Majenang bisa memerlukan waktu hingga 30 menit akibat kondisi geografis dan jarak dari pos pemadam.

Data capaian *response time* menunjukkan tren yang dinamis. Pada tahun 2022, waktu tanggap rata-rata 9 menit dengan capaian 81%, pada tahun 2023 meningkat menjadi 16,3 menit dengan capaian turun ke 80%, dan tahun 2024 mencapai rata-rata 12,5 menit dengan capaian 72%. Meskipun capaian masih relatif tinggi, data ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan pelayanan yang merata, terutama di daerah yang sulit dijangkau atau minim infrastruktur.

Untuk meningkatkan ketepatan waktu, Satpol PP Kabupaten Cilacap telah mengembangkan berbagai strategi, di antaranya adalah pelatihan berkala untuk petugas, optimalisasi kesiapan sarana dan prasarana seperti kendaraan dan peralatan, serta pengembangan inovasi teknologi melalui aplikasi Satkartaru SIAP. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk langsung melaporkan kejadian kebakaran melalui sistem digital, sehingga informasi dapat diterima secara cepat oleh petugas di pos terdekat dan mempercepat proses mobilisasi.

Secara umum, kedua indikator pada dimensi pencapaian tujuan menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Cilacap telah memiliki komitmen dan arah kebijakan yang jelas dalam penanggulangan kebakaran. Meskipun demikian, tantangan struktural seperti keterbatasan jumlah pos dan personel masih perlu diatasi agar efektivitas pelayanan dapat lebih optimal dan merata. Inovasi dan dukungan masyarakat menjadi elemen penting dalam memperkuat capaian tujuan dan mempercepat respons terhadap kejadian kebakaran di seluruh wilayah kabupaten.

b. Integrasi

Dimensi integrasi dalam teori efektivitas Duncan (dalam Steers, 1995) menggambarkan kemampuan organisasi dalam membangun hubungan internal dan eksternal secara harmonis, baik dengan sesama instansi pemerintahan, organisasi swasta, maupun masyarakat. Dalam konteks penanggulangan kebakaran, integrasi menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena sifat bencana kebakaran tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja. Efektivitas upaya penanggulangan kebakaran sangat bergantung pada sinergi antara instansi pelaksana dengan para pemangku kepentingan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, dimensi ini dianalisis berdasarkan tiga indikator utama, yaitu: sosialisasi, pengembangan konsensus dan kerjasama, serta komunikasi dengan berbagai macam organisasi.

Indikator pertama adalah sosialisasi, yang menjadi media edukasi dan transfer pengetahuan kepada masyarakat tentang cara mencegah dan menangani kebakaran. Satpol PP Kabupaten Cilacap melalui Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah melaksanakan sosialisasi sebanyak 162 kali selama tahun 2024. Sosialisasi dilakukan di sekolah-sekolah, tempat wisata, kantor pemerintahan, dan lingkungan dunia usaha. Materi yang diberikan antara lain mencakup penggunaan alat pemadam api ringan

(APAR), penanganan tabung gas bocor, hingga upaya penanganan awal jika terjadi kebakaran. Namun demikian, sosialisasi ini bersifat pasif, artinya dilaksanakan hanya jika ada permintaan dari pihak eksternal, seperti lembaga atau komunitas.

Akibat pendekatan yang masih bersifat responsif tersebut, sebaran sosialisasi belum merata di seluruh kecamatan, terutama di wilayah pedesaan yang relatif jauh dari pusat kota dan pos pemadam. Warga di wilayah tersebut sebagian besar belum pernah mengikuti sosialisasi kebakaran. Wawancara dengan warga dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa ketidaktahuan tentang langkah-langkah tanggap darurat saat kebakaran masih menjadi masalah umum. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan sosialisasi masih bersifat eksklusif dan belum menjangkau masyarakat secara luas, padahal justru masyarakat di daerah terpencil yang lebih membutuhkan pemahaman tentang penanggulangan kebakaran secara tepat.

Indikator kedua adalah pengembangan konsensus dan kerjasama, yang menunjukkan seberapa besar kapasitas Satpol PP Kabupaten Cilacap dalam menjalin kolaborasi dengan pihak luar untuk memperkuat sistem penanggulangan kebakaran. Satpol PP telah menjalin kerjasama dengan pihak swasta, seperti Pertamina, PLTU, dan Pelindo, serta lembaga pemerintah lain seperti BPBD dan Basarnas. Salah satu bentuk kerjasama yang paling menonjol adalah pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) yang tersebar di 24 kecamatan. REDKAR secara aktif terlibat dalam pemadaman, membuka akses jalan untuk armada damkar, hingga memberikan edukasi kepada masyarakat.

Kerjasama ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diwujudkan melalui kegiatan nyata seperti pelatihan bersama, simulasi penanganan bencana, hingga peminjaman peralatan darurat ketika dibutuhkan. Dalam beberapa kasus, Satpol PP Cilacap juga aktif membantu penanganan kebakaran di wilayah tetangga seperti Banyumas, Purbalingga, dan Kebumen, sebagai bentuk solidaritas antardaerah. Ini menunjukkan bahwa kerjasama yang dibangun tidak bersifat parsial, melainkan menciptakan jejaring kemanusiaan yang lebih luas. Menurut Kapucu & Garayev (2014), efektivitas penanganan bencana sangat ditentukan oleh kekuatan jaringan horizontal dan vertikal antar aktor kelembagaan.

Indikator ketiga adalah komunikasi dengan berbagai macam organisasi, yang menunjukkan sejauh mana informasi dan koordinasi antar lembaga berjalan secara efektif. Di Kabupaten Cilacap, Satpol PP telah mengembangkan sistem komunikasi digital terintegrasi melalui aplikasi *Satkartaru SIAP*. Aplikasi ini menghubungkan Satpol PP dengan 11 institusi swasta dan pemerintah yang memiliki armada pemadam kebakaran, seperti Pertamina dan PLTU. Aplikasi ini memungkinkan respon cepat ketika terjadi kebakaran dan menjadi sarana pelaporan masyarakat secara langsung. Selain itu, komunikasi lintas instansi juga dibangun melalui grup WhatsApp Forkopimcam di masing-masing kecamatan yang melibatkan BPBD, PLN, TNI, Polri, dan tokoh masyarakat.

Untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pelaporan, Satpol PP Cilacap juga tengah menyiapkan layanan panggilan darurat 112 yang akan terkoneksi langsung dengan semua instansi terkait. Melalui sistem ini, laporan kejadian kebakaran akan segera diteruskan ke pos terdekat, sehingga mempercepat proses respons dan evakuasi. Inovasi ini menunjukkan bahwa komunikasi menjadi tulang punggung integrasi dalam penanganan bencana kebakaran di Kabupaten Cilacap.

Secara keseluruhan, dimensi integrasi pada penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Cilacap telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam aspek kerjasama dan komunikasi antarlembaga. Namun, masih terdapat kekurangan dalam aspek sosialisasi yang perlu diperbaiki, khususnya dalam hal pemerataan dan

keberlanjutan kegiatan edukasi kepada masyarakat di wilayah pinggiran. Meningkatkan intensitas dan cakupan sosialisasi akan menjadi kunci dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dan mendukung efektivitas kelembagaan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Dengan integrasi yang semakin solid, diharapkan upaya penanggulangan kebakaran dapat dilakukan secara kolaboratif, cepat, dan efisien di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap.

c. Adaptasi

Dimensi adaptasi dalam teori efektivitas Duncan (dalam Steers, 1995) mengacu pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan tantangan yang berkembang, terutama dalam konteks penanggulangan bencana. Dalam studi ini, adaptasi dianalisis melalui dua indikator utama, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan sarana serta prasarana pendukung. Keduanya merupakan elemen penting yang saling berkaitan dalam meningkatkan kualitas layanan penanggulangan kebakaran yang efektif, tanggap, dan profesional.

Indikator pertama adalah peningkatan kapasitas SDM, yang menjadi tulang punggung keberhasilan operasional di lapangan. Satpol PP Kabupaten Cilacap secara bertahap melakukan peningkatan kompetensi petugas pemadam kebakaran melalui pelatihan dan sertifikasi. Sebagian besar petugas telah mengikuti pelatihan dasar dan lanjutan yang diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri serta memiliki sertifikat Damkar Tingkat I. Namun, peningkatan belum sepenuhnya merata karena terkendala pada anggaran dan keterbatasan akses pelatihan. Selain pelatihan formal, petugas juga rutin mengikuti program dari mitra seperti Pertamina RU IV, yang mengadakan pelatihan dasar pemadaman selama tiga hari dengan praktik langsung di lapangan.

Selain pelatihan teknis, Satpol PP Kabupaten Cilacap juga memperhatikan kebugaran fisik personel melalui kegiatan kesamaptaaan tahunan. Kegiatan ini melibatkan latihan fisik seperti lari, push up, dan latihan daya tahan tubuh guna memastikan kesiapan fisik petugas dalam menghadapi kondisi darurat yang menuntut kekuatan dan ketahanan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM tidak hanya fokus pada kompetensi teknis, tetapi juga aspek fisik dan mental, sebagai wujud kesiapsiagaan menyeluruh dalam menjalankan tugas.

Indikator kedua adalah peningkatan sarana dan prasarana, yang dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu pendataan, pemeliharaan, dan pengadaan. Pendataan dilakukan untuk mengetahui ketersediaan dan kondisi sarana seperti kendaraan pemadam, alat pemadam api, dan infrastruktur pos. Pendekatan berbasis data spasial dan inventarisasi wilayah terbukti efektif dalam mengurangi ketidakpastian perencanaan dan pengambilan keputusan penanggulangan bencana (Gutenson *et al.*, 2017). Proses ini dilakukan melalui inspeksi rutin tahunan, serta survei ke titik-titik strategis di wilayah Kabupaten Cilacap. Data yang terkumpul kemudian digunakan sebagai dasar perencanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana secara terukur dan berkelanjutan.

Dalam aspek pemeliharaan, Satpol PP menerapkan sistem pemeriksaan rutin setiap pergantian piket untuk memastikan kelayakan alat. Petugas juga melakukan perbaikan mandiri untuk kerusakan ringan, terutama pada bagian vital seperti selang nozzle dan peralatan semprot. Untuk kerusakan berat, Satpol PP menjalin kerjasama dengan bengkel pihak ketiga atau CV profesional yang telah bermitra secara resmi. Ini menunjukkan adanya sistem adaptif dalam menjaga keberfungsian peralatan, baik melalui internalisasi keahlian maupun kolaborasi dengan eksternal.

Sementara itu, dalam hal pengadaan, Satpol PP Kabupaten Cilacap terus berupaya memenuhi kebutuhan armada dan peralatan yang masih terbatas. Hingga saat ini, Kabupaten Cilacap baru memiliki empat pos pemadam kebakaran, sementara idealnya

satu kecamatan memiliki satu pos. Jumlah alat pelindung diri (APD) juga belum mencukupi; misalnya, baju tahan api masih digunakan secara bergantian karena keterbatasan stok. Pemerintah daerah melalui perencanaan jangka menengah menargetkan pengadaan satu unit mobil pemadam kebakaran setiap tahun dan pembangunan pos tambahan, termasuk rencana pembangunan Pos Damkar di Kecamatan Jeruk Legi pada tahun 2026.

Secara keseluruhan, dimensi adaptasi dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Cilacap menunjukkan adanya komitmen kuat dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, baik dari sisi manusia maupun sarana pendukung. Meskipun masih terdapat berbagai keterbatasan, pendekatan bertahap yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Cilacap mencerminkan respons adaptif yang berorientasi pada keberlanjutan dan efisiensi. Dengan peningkatan ini, diharapkan efektivitas penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Cilacap dapat semakin optimal dalam menjawab tantangan wilayah yang luas dan beragam.

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya mengenai dimensi efektivitas penanggulangan kebakaran (meliputi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi) terdapat sejumlah tantangan yang secara langsung memengaruhi kualitas layanan pemadam kebakaran di Kabupaten Cilacap. Salah satu kendala utama berada pada dimensi adaptasi, yaitu keterbatasan jumlah personel dan luas wilayah kerja yang sangat besar. Dengan luas 2.253,61 km² dan hanya empat pos damkar, distribusi personel dan armada pemadam menjadi tidak sebanding dengan cakupan wilayah. Hal ini berdampak pada capaian *response time* yang belum merata di seluruh kecamatan, sebagaimana telah dibahas dalam dimensi pencapaian tujuan.

Selain itu, kendala juga tampak pada dimensi integrasi, terutama dalam hal pengetahuan dan sikap masyarakat yang masih rendah terhadap risiko dan penanggulangan kebakaran. Minimnya sosialisasi aktif serta belum meratanya edukasi pencegahan di daerah pedesaan menyebabkan masih tingginya kebakaran akibat korsleting listrik, yang sejauh ini menjadi penyebab utama insiden di Kabupaten Cilacap. Keterbatasan ini diperparah oleh infrastruktur pos damkar yang masih sangat terbatas, jauh dari standar ideal menurut Permendagri No. 16 Tahun 2020 yang mengamanatkan satu pos damkar per kecamatan.

Kendala lain adalah terbatasnya anggaran yang berdampak pada kelambatan pembangunan pos baru, pengadaan APD dan armada, serta pelatihan SDM. Meskipun ada rencana strategis dan dukungan anggaran dari APBD, realisasi program masih dilakukan secara bertahap karena kapasitas fiskal daerah yang terbatas dan struktur kelembagaan pemadam kebakaran yang belum mandiri (masih berada di bawah Satpol PP). Ini tentu mempengaruhi fleksibilitas pengelolaan anggaran, terutama untuk keperluan mendesak di bidang kebakaran.

Menanggapi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Satpol PP telah mengimplementasikan berbagai upaya strategis untuk memperkuat efektivitas penanggulangan bencana kebakaran. Upaya ini menjadi bagian dari tindak lanjut konkret terhadap kelemahan dalam ketiga dimensi efektivitas yang sebelumnya telah dibahas. Di antaranya adalah penambahan jumlah pos damkar secara bertahap yang dimulai dengan rencana pembangunan Pos Damkar di Kecamatan Jeruklegi pada tahun 2026. Langkah ini diharapkan dapat memperpendek waktu tanggap (*response time*) dan memperluas jangkauan pelayanan.

Selanjutnya, untuk menjawab tantangan pada aspek integrasi, dilakukan penguatan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan dan pelatihan REDKAR, yang kini sudah aktif di seluruh kecamatan. REDKAR tidak hanya mendukung dalam situasi kebakaran, tetapi juga terlibat dalam edukasi, mitigasi bencana, serta piket malam di pos damkar. Disertai dengan program sosialisasi dan simulasi kebakaran, baik secara langsung maupun melalui media sosial, diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat dalam upaya pencegahan dan respons dini terhadap kebakaran.

Dari sisi inovasi teknologi, peluncuran aplikasi Satkartaru SIAP menjadi tonggak penting dalam dimensi adaptasi. Aplikasi ini tidak hanya mempercepat pelaporan kejadian kebakaran oleh masyarakat, tetapi juga mengintegrasikan sistem komunikasi antarinstansi dan perusahaan mitra yang memiliki armada damkar. Rencana peluncuran layanan panggilan darurat 112 juga menjadi bentuk keseriusan daerah dalam menjawab tantangan respon cepat dan sistem yang terkoordinasi. Kolaborasi lintas sektor (terutama dengan Pertamina dan pelaku industri lainnya) mendukung penguatan pelatihan SDM, penyediaan APD, hingga penanganan insiden besar di wilayah pesisir.

Dengan demikian, rangkaian kendala dan upaya yang telah diidentifikasi menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Cilacap secara aktif berproses dalam membenahi sistem penanggulangan kebakaran. Upaya-upaya ini tidak hanya menjawab kelemahan dalam struktur dan kapasitas, tetapi juga mencerminkan adaptasi strategis terhadap kondisi daerah yang luas, risiko tinggi, dan keterbatasan sumber daya. Langkah-langkah perbaikan ini diharapkan dapat semakin memperkuat efektivitas pelayanan dasar kebakaran dan memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat Cilacap. Menurut Labolo (2011), pemerintahan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat akan mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang terus berkembang.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan bencana kebakaran oleh Satpol PP Kabupaten Cilacap belum optimal, terutama dalam hal pencapaian standar response time dan pelayanan penyelamatan korban. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan jumlah pos pemadam kebakaran, armada, dan personel yang belum memenuhi standar nasional. Temuan ini sama halnya dengan hasil penelitian Muthmainnah (2022) yang menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan kebakaran di Kota Langsa juga masih mengalami kendala pada dimensi integrasi dan adaptasi akibat keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya kolaborasi antarstakeholder.

Namun, berbeda dengan temuan Abdillah (2022) yang meneliti di Kota Administrasi Jakarta Timur, di mana efektivitas penanggulangan kebakaran sudah tergolong baik meskipun masih terdapat kendala akses lokasi. Perbedaan ini dapat dijelaskan dari karakteristik wilayah dan kelembagaan. Jakarta Timur memiliki struktur organisasi yang lebih mapan dengan dinas khusus, sedangkan Kabupaten Cilacap masih mengandalkan Satpol PP yang memiliki fungsi ganda dan sarana prasarana yang terbatas. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini menolak kesimpulan Abdillah (2022) karena adanya perbedaan struktur kelembagaan dan cakupan wilayah yang jauh lebih luas di Cilacap.

Selain itu, temuan penelitian ini memperkuat studi Manurung (2022) di Kota Banjarmasin yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana masih menjadi hambatan dalam aspek adaptasi, meskipun secara umum pencapaian tujuan telah cukup baik. Dalam konteks Cilacap, kendala adaptasi bahkan lebih kompleks karena selain sarana dan prasarana, pelatihan dan penguatan kapasitas SDM masih bersifat terbatas dan dilakukan secara bertahap. Keberadaan aplikasi Satkartaru SIAP dan relawan REDKAR menjadi nilai tambah, namun belum mampu sepenuhnya mengatasi ketimpangan distribusi layanan pemadam kebakaran di seluruh kecamatan.

Penelitian ini juga memperluas temuan dari Cahyani dkk. (2022) yang menyoroti efektivitas sosialisasi pencegahan kebakaran di permukiman padat. Sama halnya dengan yang ditemukan di Cilacap, kegiatan sosialisasi cenderung belum merata dan masih bersifat pasif atau berdasarkan permintaan eksternal. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks integrasi, baik di wilayah kota besar maupun kabupaten, tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat masih menjadi hambatan yang berulang.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur mengenai efektivitas penanggulangan kebakaran di daerah yang belum memiliki dinas pemadam kebakaran tersendiri. Dalam konteks manajemen pemerintahan daerah, kelembagaan yang efisien dan terstruktur menjadi kunci utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Hamid, 2018). Selain menunjukkan bahwa pendekatan kelembagaan non-dinas seperti Satpol PP dapat menjalankan fungsi penanggulangan dengan inovasi tertentu, penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan efektivitas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, struktur kelembagaan, dan cakupan wilayah tugas. Temuan ini sejalan dengan argumentasi Steers (1985) dalam teori efektivitas organisasi, bahwa pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi harus berjalan secara seimbang agar organisasi dapat dikatakan efektif.

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah keberadaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Cilacap. Peran REDKAR terbukti signifikan dalam membantu proses pemadaman, terutama dalam membuka akses jalan, memberikan bantuan awal, serta menyosialisasikan upaya pencegahan kepada masyarakat. Keberadaan mereka menjadi faktor pendukung penting dalam menutupi keterbatasan jumlah personel resmi dari Satpol PP. Kolaborasi antara Satpol PP dan REDKAR juga menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat secara aktif dapat meningkatkan efektivitas respons bencana kebakaran.

Temuan lainnya berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi Satkartaru SIAP sebagai alat bantu pelaporan kebakaran secara cepat dan terintegrasi. Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam melaporkan kejadian secara langsung, yang kemudian diteruskan ke pos sektor terdekat. Selain itu, aplikasi ini juga menghubungkan Satpol PP dengan sejumlah instansi strategis seperti BPBD, PLN, dan perusahaan industri yang memiliki armada pemadam kebakaran. Penggunaan teknologi ini menjadi bentuk adaptasi yang responsif terhadap tantangan geografis dan mempercepat proses koordinasi lintas sektor.

Namun demikian, keterbatasan jumlah pos sektor pemadam kebakaran di Kabupaten Cilacap masih menjadi hambatan utama. Dari 24 kecamatan, hanya terdapat empat pos sektor aktif yang mampu menjangkau wilayah operasional dalam waktu cepat. Hal ini menyebabkan tidak meratanya cakupan layanan, terutama di kecamatan yang jauh dari pusat kota. Keterbatasan ini berdampak langsung terhadap capaian waktu tanggap dan keberhasilan penyelamatan korban, sehingga perlu menjadi perhatian strategis dalam perencanaan penguatan kelembagaan ke depan.

Selain itu, kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran oleh Satpol PP masih bersifat pasif dan belum menjangkau seluruh wilayah. Sosialisasi lebih banyak dilakukan berdasarkan permintaan eksternal, seperti dari sekolah atau instansi swasta. Akibatnya, sebagian besar masyarakat di daerah pinggiran belum memahami langkah-langkah penanganan awal saat kebakaran terjadi. Rendahnya jangkauan edukasi ini berkontribusi terhadap tingginya kasus kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian, seperti korsleting listrik atau penggunaan LPG yang tidak aman. Kesiapsiagaan psikologis masyarakat menjadi aspek penting dalam menurunkan risiko dan memperkuat respons individu terhadap potensi bencana kebakaran (Every *et al.*, 2019). Kebakaran permukiman sering kali dipicu oleh faktor domestik seperti kelalaian dan infrastruktur rumah tangga yang tidak memenuhi standar keselamatan (Muzani, 2020). Oleh karena itu, pendekatan edukatif yang lebih proaktif dan merata menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya pencegahan kebakaran di Kabupaten Cilacap.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penanggulangan bencana kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap

belum sepenuhnya optimal. Hal ini tercermin dari masih rendahnya capaian indikator kinerja utama seperti waktu tanggap (*response time*) dan tingkat keberhasilan penyelamatan korban yang belum memenuhi standar minimal pelayanan. Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah pos sektor pemadam kebakaran, kurangnya personel, serta keterbatasan sarana dan prasarana.

Dalam dimensi pencapaian tujuan, Satpol PP telah memiliki arah kebijakan yang jelas dan berusaha mencapai target yang telah ditentukan. Namun, keterbatasan struktural dan geografis menghambat konsistensi pelayanan yang merata di seluruh wilayah. Pada dimensi integrasi, terdapat upaya sinergi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk pembentukan relawan REDKAR dan pemanfaatan aplikasi pelaporan kebakaran, meskipun kegiatan sosialisasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Sedangkan dalam dimensi adaptasi, upaya peningkatan kapasitas SDM dan pengadaan peralatan telah dilakukan, namun masih bersifat bertahap dan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai inisiatif dan inovasi yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Cilacap, efektivitas penanggulangan kebakaran masih memerlukan penguatan dari sisi kelembagaan, SDM, anggaran, serta perluasan cakupan layanan. Oleh karena itu, diperlukan strategi berkelanjutan dan kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar kebakaran dan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko kebakaran di masa mendatang.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati, terutama pada aspek cakupan data dan ruang lingkup wilayah observasi. Penelitian difokuskan pada analisis efektivitas penanggulangan kebakaran oleh Satpol PP Kabupaten Cilacap sehingga belum mengakomodasi perspektif lintas sektor secara lebih mendalam, seperti dari pihak BPBD, PLN, dan lembaga swasta lain yang juga terlibat dalam penanganan kebakaran. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan observasi lapangan tidak dilakukan secara merata di seluruh 24 kecamatan, sehingga hasil penelitian lebih bersifat representatif dari wilayah dengan aksesibilitas yang lebih tinggi terhadap layanan pemadam kebakaran.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan dengan melibatkan aktor-aktor lintas sektoral dan mengkaji efektivitas penanggulangan kebakaran secara lebih menyeluruh, termasuk dari sisi kelembagaan BPBD, perusahaan mitra, dan respons masyarakat. Selain itu, pendekatan kuantitatif atau metode campuran juga dapat dipertimbangkan untuk mengukur persepsi publik dan efektivitas program secara statistik. Penelitian masa depan juga dapat mengangkat tema kesiapsiagaan masyarakat berbasis komunitas (*community-based disaster preparedness*) atau menganalisis efektivitas teknologi informasi seperti aplikasi darurat dan sistem pemetaan kebakaran dalam mempercepat respons kebencanaan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Satpol PP Kabupaten Cilacap, khususnya Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, atas dukungan dan kerja sama selama penelitian ini. Terima kasih juga kepada para informan, petugas, serta masyarakat yang telah bersedia memberikan waktu, informasi, dan data yang relevan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan efektivitas penanggulangan kebakaran di Kabupaten Cilacap.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, T. (2023). Efektivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Timur. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14717>
- Adzim, & Ilma, H. (2013). *Pengertian dan Elemen Sistem Manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kesehatan Kerja)*. Ahli K3 Umum.
- Cahyani, N., Zahran, W. S., & Irwansyah, I. (2022). Efektivitas Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Bangunan Rumah dan Lahan pada Masyarakat di Permukiman Padat Penduduk. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(4). <https://doi.org/10.31334/jiap.v2i4.2944>
- Challands, N. (2010). The Relationships Between Fire Service Response Time and Fire Outcomes. *Fire Technology*, 46(3), 665–676. <https://doi.org/10.1007/s10694-009-0111-y>
- Ermaya. (2007). *Ketertiban dan Ketentraman Umum dalam Perspektif Hukum Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN.
- Labolo, M. (2011). *Memahami Ilmu Pemerintahan; Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manurung, M. (2014). Analisis Efektivitas Pembinaak Koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) Kabupaten Rokan Hilir. *Ilmiah*, 7-25. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/4181>
- Muthmainnah, S. (2022). Efektivitas Penanggulanagn Bencana Kebakaran Permukiman di Kota Langsa Provinsi Aceh. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/8630>
- Muzani. (2020). *Bencana Kebakaran Permukiman (1st ed.)*. Deepublish.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Steers, R. M. (1985). *Motivation and Work Behavior*. Mc Graw-Hill
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yulizar, A. R. (2023). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kota Padang. *Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik*, 7(1). <https://doi.org/10.24036/jtrap.v7i1.102>
- Kapucu, N., & Garayev, V. (2014). Structure and Network Performance: Horizontal and Vertical Networks in Emergency Management. *Administration & Society*, 48(8). <https://doi.org/10.1177/0095399714541270>
- Rofiyanti, E., Sumaryana, A., Ismanto, S. U., & Sukarno, D. (2024). Analysis of the Government's Strategy and Capacity in Reducing the Risk of Fire Disasters in the Indonesian Capital. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(11), 7652. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i11.7652>
- Every, D., McLennan, J., Reynolds, A., & Trigg, J. (2019). Australian householders' psychological preparedness for potential natural hazard threats: An exploration of contributing factors. *International Journal of Disaster Risk Reduction*. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2019.101203Z>
- Gutenson, J. L., Oubeidillah, A. A., Ernest, A. N. S., Zhu, L., Zhang, X., & Sadeghi, S. T. (2017). Investigating uncertainty in developing regional building inventories for flood damage prediction. *Natural Hazards Review*, 18(3). [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)NH.1527-6996.0000240](https://doi.org/10.1061/(ASCE)NH.1527-6996.0000240)

